



## **Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia**

**Muhamad Chehafudin<sup>1\*</sup>, Samodra Wibawa<sup>2</sup>, Soesilo Wibowo<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka*

*<sup>2</sup>Departemen Manajemen Kebijakan Publik/FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*

*<sup>3</sup>Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor*

### ARTICLE INFO

---

*Article history:*

Received 21/04/2022

Received in revised form 31/05/2022

Accepted 25/07/2022

---

### **Abstract**

This study aims to analyze the effect of the Village Fund on poverty alleviation and improvement of basic infrastructure services for drinking water and sanitation in districts and cities in Indonesia. The need for evaluation of the Village Fund policy is a consequence of the implementation of fiscal decentralization to villages based on Law no. 6/2014. This policy has implications for an increase in transfer funds to villages of more than IDR 329 trillion cumulatively. Theoretically, fiscal decentralization to villages should improve public services and accelerate poverty reduction through local preferences matching and more efficient allocations. This research was a quantitative study using path analysis to test the hypotheses. Data were obtained from BPS and the Ministry of Finance for all districts/cities receiving Village Fund. The results show that The Village Fund had a significant effect on poverty reduction nationally, although its contribution was very small, and the effect was not significant in districts/cities with low fiscal capacity. The Village Funds had an effect on increasing drinking water but not significant, on the other hand, it had a significant effect on districts/cities with medium or low fiscal capacity with low poverty rate. The Village Fund had an effect on improving sanitation but it was not significant nationally or in all districts/cities. The Village Fund for drinking water had no significant effect on poverty reduction nationally and for all districts/cities. The Village Fund for sanitation had no effect on poverty reduction nationally or in all districts/cities but it had an effect on districts/cities with low fiscal capacity and poverty rate even though it was not significant. The implementation of the Village Fund policy needs to consider the fiscal capacity and diversity of regional characteristics in order to make the effectiveness of the Village Fund more optimal.

**Keywords:** *Policy evaluation, Village Fund, Poverty, Drinking Water, Sanitation.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan infrastruktur dasar air minum serta sanitasi kabupaten/kota di Indonesia. Kebutuhan evaluasi kebijakan Dana Desa merupakan konsekuensi dari implementasi desentralisasi fiskal ke desa berdasarkan UU No. 6/2014. Kebijakan ini berimplikasi pada naiknya dana transfer ke Desa lebih dari Rp 329 triliun secara kumulatif. Secara teoritis, desentralisasi fiskal kepada Desa seharusnya memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pencocokan preferensi lokal dan alokasi yang lebih efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder BPS dan Kememkeu untuk seluruh kabupaten-kota penerima dana. Analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji hipotesis Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional meski kontribusinya sangat kecil dan pengaruhnya tidak signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah. 2) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan air minum secara nasional tapi tidak signifikan, namun pengaruhnya signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal sedang atau rendah dengan kemiskinan rendah. 3) Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan sanitasi namun tidak signifikan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota. 4) Dana Desa untuk air minum berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional dan untuk seluruh kabupaten/kota. 5) Dana Desa untuk sanitasi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota tapi berpengaruh tidak signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan kemiskinan rendah. Implementasi kebijakan Dana Desa perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal dan keragaman karakteristik daerah sehingga efektivitas Dana Desa bisa lebih optimal.

**Kata kunci:** *Evaluasi kebijakan, Dana Desa, Kemiskinan, Air Minum, Sanitasi.*

<sup>\*)</sup>E-mail : chehafudin@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di era reformasi dengan lahirnya UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 23/2014, dan UU No. 6/2014, telah mendorong adanya perubahan paradigma pembangunan secara mendasar di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi dan pembangunan di desa, UU No. 6/2014 atau UU Desa telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. (Faoziyah & Salim, 2020) menyebutkan melalui kebijakan UU Desa, pemerintah telah melakukan evolusi signifikan dengan memberikan otoritas lebih tinggi di desa termasuk dalam hal keuangan melalui Dana Desa (DD).

Kebijakan Dana Desa bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan

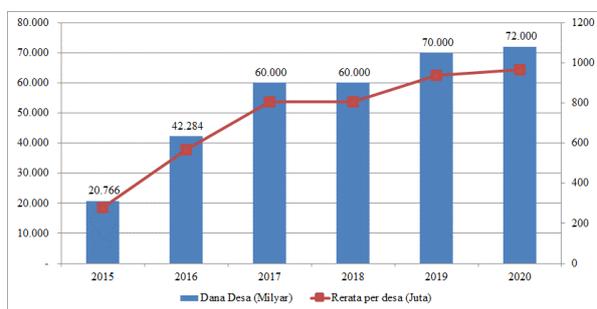
fungsi desa dalam pembangunan desa sesuai kewenangannya. (Kemenkeu, 2018). Merujuk Teori Transfer Fiskal (*Theory of Grants*), Dana Desa dapat dikategorikan sebagai hibah pendamping atau bantuan keuangan (Akbar & Sihloho, 2019). Dana Desa berfungsi antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus pemerataan pembangunan (Eko et al., 2016).

Kebijakan Dana Desa bukan hal baru di Asia. Hingga 2009 beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa, yaitu Thailand melalui Dana Desa, Bangladesh melalui *Gramend Bank*, BRAC, dan ASA; Vietnam melalui *Vietnam Bank for Social Policy*; India melalui *Spandana*; dan (Boonperm et al., 2012 dalam (Faoziyah & Salim, 2020). Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, kebijakan Dana

Desa melengkapi berbagai kebijakan desentralisasi fiskal yang telah ada sebelumnya antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi untuk alokasi Dana Desa sebesar 10% dari total APBN membawa konsekuensi naiknya nilai Dana Desa seiring meningkatnya nilai APBN setiap tahunnya, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Nilai Transfer Dana Desa Tahun 2015-2020



Sumber: Kemenkeu 2020

Dengan peningkatan nilai APBN maka rerata penerimaan Dana Desa per desa juga meningkat signifikan. Rerata penerimaan Dana Desa sebesar Rp280 juta per desa pada 2015 dan meningkat mencapai Rp950 juta pada 2020. Peningkatan alokasi Dana Desa ini untuk memenuhi peta jalan Dana Desa sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah secara bertahap sebagaimana amanah UU Desa (Sirait & Octavia, 2021).

Merujuk Teori Desentralisasi Fiskal, Hayek (1945); Tiebout (1956); Musgrave (1969) (Sow & Razafimahefa, 2015) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pencocokan preferensi dan alokasi yang efisien. Oates (1972) dalam (Sow & Razafimahefa, 2015) menyebutkan peningkatan efisiensi alokasi akan terjadi ketika layanan publik disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kendali atas wilayah geografis minimum.

Padal 67 UU Desa menyebutkan bahwa desa berkewajiban antara lain meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. (Eko et al., 2016) menjelaskan Dana Desa bertujuan menyentuh langsung kepentingan masyarakat setempat untuk pengurangan kemiskinan.

Faktanya, hingga Tahun 2021, BPS melaporkan tingkat kemiskinan perdesaan masih cukup tinggi sebesar 12,53% dibandingkan di perkotaan 7,6%. Dalam konteks kemiskinan multidimensi, infrastruktur pelayanan dasar juga menjadi isu pembangunan. RPJMN 2015-2019 telah menetapkan target cakupan air minum layak dan sanitasi layak sebesar 100%, namun secara faktual hingga akhir 2021 capaiannya masih 90,78% untuk air minum dan 80,29% untuk sanitasi.

Ketersediaan air yang memadai sangat terkait dengan kemiskinan. Ketersediaan air yang memadai akan meningkatkan produktivitas, baik pada sektor barang maupun jasa (Tortajada dalam (Putra & Rianto, 2016). Terkait isu sanitasi, buruknya kualitas sanitasi merupakan penyebab lain dari kemiskinan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sanitasi dan pelayanan yang buruk merupakan akar dari kemiskinan (Tisniwati, 2012)

Berdasarkan data Susenas 2020, Bappenas menyebutkan bahwa hanya 47,4% penduduk miskin kronis yang memiliki akses air minum layak dan hanya 57,76% yang memiliki akses sanitasi layak. Data ini menunjukkan rendahnya cakupan air minum dan sanitasi dapat semakin memperburuk kondisi penduduk dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa kebijakan Dana Desa yang berjalan lebih dari dari tujuh tahun belum diimplementasikan secara efektif untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar infrastruktur air minum serta sanitasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan Dana Desa terkait dua isu atas. Kraft & Furlong (2013) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai penilaian apakah suatu kebijakan dan program telah berjalan dengan baik. Analisisnya mencari bukti apakah suatu program telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Kebijakan Dana Desa menjadi topik menarik dan telah banyak dikaji dengan berbagai aspeknya. Sunu & Utama (2019) menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dengan analisis jalur, disimpulkan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kadafi, Sudrahman, & Sudrahman (2020) meneliti implikasi Dana Desa terhadap kemiskinan. Melalui regresi, disimpulkan Dana Desa berimplikasi kepada kemiskinan sebesar 12,7%. Penelitian serupa oleh Zakaria, Mony, & Wahyudi (2020) menyimpulkan bahwa Dana Desa berimplikasi pada penurunan kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) pengaruh Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, 2) pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan infrastruktur air minum, 3) pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan infrastruktur sanitasi, 4) pengaruh Dana Desa untuk infrastruktur air minum terhadap penurunan kemiskinan, dan 5) pengaruh Dana Desa untuk infrastruktur sanitasi terhadap penurunan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk uji hipotesis. Data penelitian ini merupakan data sekunder bersumber dari BPS dan Kemenkeu dengan cakupan seluruh kabupaten/kota penerima Dana Desa. Tidak ada metode sampling dalam penelitian ini.

Fokus penelitian adalah analisis Dana Desa terhadap kemiskinan dan infrastruktur pelayanan dasar air minum serta sanitasi. Dengan tujuan memperkaya analisis, pengaruh Dana Desa dibandingkan dengan skema desentralisasi fiskal yang lain yakni DAU dan DAK. Untuk kepentingan evaluasi maka analisis perbandingan pengaruh Dana Desa dengan skema lain menjadi relevan.

Variabel dalam analisis jalur terdiri atas variabel eksogen, mediasi dan endogen. Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah: Dana Desa sebagai X1, Dana Alokasi Umum sebagai X2, dan Dana Alokasi Khusus sebagai X3. Variabel mediasi meliputi air minum layak sebagai Z1 dan sanitasi layak sebagai Z2. Variabel eksogen tingkat kemiskinan sebagai variabel Y.

Analisis jalur diterapkan dalam dua tahap. Pertama, untuk seluruh kabupaten/kota sebagai basis analisis pengaruh Dana Desa secara nasional. Kedua, untuk kabupaten/kota sesuai klaster berdasarkan kapasitas fiskal dan kemiskinannya. Pengelompokan untuk analisis klaster sebagai berikut:

Kapasitas Fiskal	Tingkat kemiskinan	
	Tinggi (>10,19%)	Rendah (≤10,19%)
Tinggi (>1,168)	Klaster 1 = 49 Kab/Kota	Klaster 4 = 53 Kab/Kota
Sedang (0,747-1,168)	Klaster 2 = 55 Kab/Kota	Klaster 5 = 41 Kab/Kota
Rendah (<0.747)	Klaster 3 = 143 Kab/Kota	Klaster 6 = 93 Kab/kota

Sumber: Hasil pengelompokan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (Kemenkeu, 2020) dan tingkat kemiskinan (BPS, 2020)

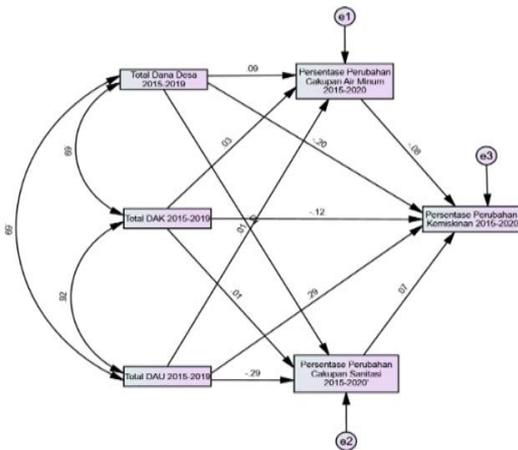
Hipotesis penelitian ini meliputi:

- H1: Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
- H2: Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap infrastruktur air minum.
- H3: Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap infrastruktur sanitasi.
- H4: Dana Desa untuk infrastruktur air minum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
- H5: Dana Desa untuk infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

**HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS**

**a) Analisis Jalur**

Analisis untuk seluruh kabupaten dan kota dengan SPSS, menghasilkan model sebagai berikut:



Persamaan struktural yang dihasilkan sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Air Minum (Z1)} = 0.093 \text{ Z DD} + 0.007 \text{ Z DAU} + 0.034 \text{ Z DAK} + \epsilon_1$$

$$\text{Cakupan Sanitasi (Z2)} = 0.044 \text{ Z DD} - 0.285 \text{ Z DAU} + 0.007 \text{ Z DAK} + \epsilon_2$$

$$\text{Perubahan Kemiskinan (Y)} = -0.201 \text{ Z DD} + 0.294 \text{ Z DAU} - 0.121 \text{ Z DAK} - 0.076 \text{ Z Air Minum} + 0.065 \text{ Z Sanitasi} + \epsilon_3$$

**b) Koefisien determinan.**

Koefisien determinasi analisis jalur sebagai berikut:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.291 <sup>a</sup>	.085	-.091	1.12708

a. Predictors: (Constant), Persentase Perubahan Cakupan Sanitasi 2015-2020', Total DAK 2015-2019, Persentase Perubahan Cakupan Air Minum 2015-2020, Total Dana Desa 2015-2019, Total DAU 2015-2019

b. Dependent Variable: PersentasePerubahanKemiskinan20152020\_

Sumber: Hasil Analisis SPSS

Nilai R Square menunjukkan besarnya nilai keragaman penurunan kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel penelitian. Pada uji ini, didapatkan nilai R Square sebesar 0.085, artinya 8,5% keragaman dari perubahan kemiskinan disebabkan oleh DD, DAU dan DAK, perubahan cakupan air minum dan perubahan cakupan sanitasi. Hal ini berarti 92,5% keragaman penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

**c) Uji F**

Uji F Sub Struktur 3 sebagai berikut:

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.796	5	7.359	3.251	.007 <sup>b</sup>
	Residual	962.178	425	2.264		
	Total	998.974	430			

a. Dependent Variable: Persentase Perubahan Kemiskinan 2015-2020

b. Predictors: (Constant), Persentase Perubahan Cakupan Sanitasi 2015-2020', Persentase Perubahan Cakupan Air Minum 2015-2020, Total Dana Desa 2015-2019, Total DAK 2015-2019, Total DAU 2015-2019

Sumber: Hasil Analisis SPSS

**d) Uji T**

Uji T Sub Struktur 3 sebagai berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.874	.244		-7.666	.000
	Total Dana Desa 2015-2019	-8.210E-10	.000	-.201	-3.001	.003
	Total DAU 2015-2019	3.077E-10	.000	.294	2.380	.018
	Total DAK 2015-2019	-3.914E-10	.000	-.121	-.986	.325
	Persentase Perubahan Cakupan Air Minum 2015-2020	-.006	.004	-.073	-1.515	.131
	Persentase Perubahan Cakupan Sanitasi 2015-2020'	.006	.005	.062	1.267	.206

a. Dependent Variable: Persentase Perubahan Kemiskinan 2015-2020

Sumber: Hasil Analisis SPSS

**e) Uji Hipotesis:**

Uji hipotesis dari analisis jalur seluruh kabupaten/kota sebagai berikut:

H	Jalur		Std Estimate	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
H2	X1 (Dana Desa)	----> Z1 (Air Minum)	0.093	0	1.386	0.166	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z1 (Air Minum)	0.034	0	0.279	0.78	
	X3 (DAU)	----> Z1 (Air Minum)	0.007	0	0.054	0.957	
H3	X1 (Dana Desa)	----> Z2 (Sanitasi)	0.044	0	0.676	0.499	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z2 (Sanitasi)	0.007	0	0.058	0.954	
	X3 (DAU)	----> Z2 (Sanitasi)	-0.285	0	-2.371	0.018	
H1	X1 (Dana Desa)	----> Y (Kemiskinan)	-0.201	0	-3.01	0.003	Terbukti
	X2 (DAK)	----> Y (Kemiskinan)	-0.121	0	-0.989	0.323	
	X3 (DAU)	----> Y (Kemiskinan)	0.294	0	2.387	0.017	
H4	Z1 (Air Minum)	----> Y (Kemiskinan)	-0.076	0.004	-1.594	0.111	
	Z2 (Sanitasi)	----> Y (Kemiskinan)	0.065	0.005	1.334	0.182	
H4	X1 melalui Z1	----> Y (Kemiskinan)	-0.007		1.046	0.296	Tidak terbukti
H5	X melalui Z2	----> Y (Kemiskinan)	0.003		0.603	0.547	Tidak terbukti
	X1 (Total: Langsung + Tidak Langsung)	----> Y (Kemiskinan)	-0.205				

Keterangan:  
  = memenuhi kriteria  
  = tidak memenuhi kriteria

Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah

Untuk pendalaman analisis, model jalur yang sama diterapkan untuk setiap klaster, namun berdasarkan uji asumsi klasik, model tersebut hanya cocok untuk klaster 3,5 dan 6. Dengan demikian uji hipotesis tingkat klaster hanya dapat diterapkan pada klaster 3,5, dan 6.

Uji hipotesis dari analisis jalur untuk klaster 3: sebagai berikut:

H	Jalur		Std Estimate	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
H2	X1 (Dana Desa)	----> Z1 (Air Minum)	0.058	0.000	0.561	0.575	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z1 (Air Minum)	-0.145	0.000	-1.050	0.294	
	X3 (DAU)	----> Z1 (Air Minum)	0.008	0.000	0.057	0.954	
H3	X1 (Dana Desa)	----> Z2 (Sanitasi)	0.093	0.000	0.897	0.37	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z2 (Sanitasi)	-0.002	0.000	-0.016	0.987	
	X3 (DAU)	----> Z2 (Sanitasi)	-0.085	0.000	-0.581	0.561	
H1	X1 (Dana Desa)	----> Y (Kemiskinan)	-0.098	0.000	-0.954	0.34	Tidak Terbukti
	X2 (DAK)	----> Y (Kemiskinan)	0.032	0.000	0.229	0.819	
	X3 (DAU)	----> Y (Kemiskinan)	0.216	0.000	1.490	0.136	
H4	Z1 (Air Minum)	----> Y (Kemiskinan)	-0.079	-0.006	-0.932	0.351	
	Z2 (Sanitasi)	----> Y (Kemiskinan)	0.01	0.001	0.125	0.901	
H4	X1 melalui Z1	----> Y (Kemiskinan)	-0.005		0.481	0.631	Tidak terbukti
H5	X melalui Z2	----> Y (Kemiskinan)	0.001		0.124	0.901	Tidak terbukti
	X1 (Total: Langsung + Tidak Langsung)	----> Y (Kemiskinan)	-0.102				

Keterangan:  
  = memenuhi kriteria  
  = tidak memenuhi kriteria

Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah

Uji hipotesis dari analisis jalur untuk klaster 5: sebagai berikut:

H	Jalur		Std Estimasi	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
H2	X1 (Dana Desa)	----> Z1 (Air Minum)	0.382	0.000	2.291	0.022	Terbukti
	X2 (DAK)	----> Z1 (Air Minum)	-0.279	0.000	-0.997	0.319	
	X3 (DAU)	----> Z1 (Air Minum)	0.077	0.000	0.276	0.782	
H3	X1 (Dana Desa)	----> Z2 (Sanitasi)	0.107	0.000	0.610	0.542	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z2 (Sanitasi)	-0.205	0.000	-0.697	0.486	
	X3 (DAU)	----> Z2 (Sanitasi)	0.016	0.000	0.053	0.958	
H1	X1 (Dana Desa)	----> Y (Kemiskinan)	0.06	0.000	0.364	0.716	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Y (Kemiskinan)	0.295	0.000	1.120	0.263	
	X3 (DAU)	----> Y (Kemiskinan)	-0.512	0.000	-1.976	0.048	
H4	Z1 (Air Minum)	----> Y (Kemiskinan)	-0.382	-0.023	-2.741	0.006	
	Z2 (Sanitasi)	----> Y (Kemiskinan)	0.11	0.006	0.829	0.407	
H4	X1 melalui Z1	----> Y (Kemiskinan)	-0.146		1.758	0.079	Tidak terbukti
H5	X melalui Z2	----> Y (Kemiskinan)	0.012		0.491	0.623	Tidak terbukti
	X1 (Total: Langsung + Tidak Langsung)	----> Y (Kemiskinan)	-0.074				

Keterangan:  
  = memenuhi kriteria  
  = tidak memenuhi kriteria

Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah

Uji hipotesis dari analisis jalur untuk klaster 6: sebagai berikut:

H	Jalur		Std Estimate	S.E.	C.R.	P	Kesimpulan
H2	X1 (Dana Desa)	----> Z1 (Air Minum)	0.391	0.000	2.809	0.005	Terbukti
	X2 (DAK)	----> Z1 (Air Minum)	0.032	0.000	0.177	0.859	
	X3 (DAU)	----> Z1 (Air Minum)	0.129	0.000	0.689	0.491	
H3	X1 (Dana Desa)	----> Z2 (Sanitasi)	0.217	0.000	1.352	0.176	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Z2 (Sanitasi)	0.135	0.000	0.652	0.514	
	X3 (DAU)	----> Z2 (Sanitasi)	-0.293	0.000	-1.356	0.175	
H1	X1 (Dana Desa)	----> Y (Kemiskinan)	-0.103	0.000	-0.631	0.528	Tidak terbukti
	X2 (DAK)	----> Y (Kemiskinan)	-0.043	0.000	-0.217	0.828	
	X3 (DAU)	----> Y (Kemiskinan)	-0.008	0.000	-0.039	0.969	
H4	Z1 (Air Minum)	----> Y (Kemiskinan)	-0.156	-0.009	-1.331	0.183	
	Z2 (Sanitasi)	----> Y (Kemiskinan)	-0.145	-0.010	-1.427	0.154	
H5	X1 melalui Z1	----> Y (Kemiskinan)	-0.061		1.203	0.229	Tidak terbukti
	X melalui Z2	----> Y (Kemiskinan)	-0.031		0.981	0.326	Tidak terbukti
	X1 (Total: Langsung + Tidak Langsung)	----> Y (Kemiskinan)	-0.195				

Keterangan:  
  = memenuhi kriteria  
  = tidak memenuhi kriteria

Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah

## PEMBAHASAN

### a). Pengaruh Dana Desa terhadap Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji hipotesis untuk seluruh kab/kota penerima Dana Desa 2015-2019 maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti secara nasional Dana Desa memberi kontribusi positif dalam penurunan tingkat kemiskinan terutama di perdesaan secara signifikan.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Joetarto, Setiawan, & Farida, 2020) yang menghitung perubahan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah Dana Desa pada 432 kabupaten/kota. Disimpulkan bahwa Dana Desa memberikan dampak positif terhadap kenaikan pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat perdesaan. Dalam hal ini, pengeluaran konsumsi adalah basis untuk pengukuran kemiskinan moneter atau konsumsi. Penelitian dengan topik yang sama oleh (Joetarto et al., 2020) juga menyimpulkan yang sama, di mana untuk 432 kabupaten/kota penerima Dana Desa terjadi kenaikan konsumsi per kapita.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sunu & Utama (2019) yang menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan dengan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Besarnya nilai koefisien jalur pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan dalam penelitian ini sebesar -0,201, mirip dengan hasil penelitian Sunu dan Utama (2019) yang menghasilkan koefisien -0.197. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian oleh Hermawan & Ahmad (2019) yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berupa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di lima provinsi di Jawa.

Terkait besarnya pengaruh, hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Dana Desa memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara statistik signifikan namun pengaruhnya relatif sangat kecil. Koefisien determinasi dari analisis jalur untuk seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa secara simultan DD, DAU dan DAK hanya memiliki pengaruh sebesar 8,5% terhadap penurunan kemiskinan nasional.

Dengan rentang periode sama, jika dibandingkan dengan skema dana transfer lain berupa DAU dan DAK, Dana Desa terbukti lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien jalur untuk Dana Desa sebesar -0,201, dibandingkan koefisien DAK sebesar -1,21 dan koefisien DAU adalah 0,294.

Analisis di atas memberi bukti bahwa implementasi kebijakan Dana Desa selama periode 2015-2019 telah berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara nasional meskipun pengaruhnya masih relatif kecil. Dapat

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini, untuk tingkat nasional, sesuai dengan teori desentralisasi fiskal yang menyebutkan bahwa efek positif dari desentralisasi fiskal adalah terjadinya penurunan kemiskinan. Merujuk pada *The Theory of Public Finance* karya Richard Musgrave, desentralisasi fiskal ini sangat relevan dengan fungsi distribusi. Menurut Musgrave & Musgrave (1989) Fungsi dsitribusi sangat terkait dengan pemerataan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan pernyataan Cheema dan Rondinelli yang menyebutkan bahwa tujuan penting desentralisasi adalah mempercepat penurunan kemiskinan (Santoso, 2020).

Dalam analisis kausalitas menggunakan regresi, nilai koefisien determinasi sebesar 8,5% memberi bukti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat kecil. Dikarenakan penelitian ini untuk kepentingan evaluasi maka hal ini justru menjadi temuan menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Koefisien determinasi sebesar 8,5% sekaligus mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia. Banyak sekali faktor lain di luar variabel penelitian ini yang memengaruhinya.

Beberapa faktor signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia secara nasional antara lain: pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan IPM (Sianturi, Syafii, & Tanjung, 2021). Faktor lainnya adalah bantuan sosial (Samputra & Ramadhani, 2019) dan pengeluaran per kapita (Tisniwati, 2012).

Secara faktual, berdasarkan analisis jalur dengan asumsi variabel lain konstan maka merujuk pada nilai koefisien yang tidak terstandarisasi (*unstandardized*), dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Rp1 trilyun

Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota hanya dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,821% poin. Nilai penurunan ini terhitung sangat kecil dibandingkan dengan besaran alokasi Dana Desa diterima setiap kabupaten/kota.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kadafi et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa Dana Desa memiliki implikasi terhadap kemiskinan di 96 kabupaten dengan desa tertinggal, namun dampaknya kecil. Hasil penelitian Saragi (2021) juga menyimpulkan bahwa dampak dari peningkatan Dana Desa yang signifikan selama periode 2015-2019 adalah penurunan kemiskinan meskipun jumlahnya sedikit.

Salah satu penyebab kecilnya pengaruh Dana Desa terhadap upaya penurunan kemiskinan dikarenakan proporsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kecil. Kementerian Keuangan (2019) mencatat selama periode 2015-2018, pemanfaatan Dana Desa masih didominasi oleh infrastruktur fisik perdesaan sebesar 79,75%, sementara itu bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 13,25%.

Jika secara nasional Dana Desa memiliki pengaruh dalam penurunan kemiskinan secara signifikan, namun hal ini tidak berlaku umum untuk seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan analisis di klaster, dapat diidentifikasi bahwa Dana Desa memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada klaster 3 dan 6, namun secara statistik tidak signifikan. Klaster 3 merupakan kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dengan kemiskinan tinggi dan klaster 6 adalah kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dengan kemiskinan rendah. Pada klaster 5 yakni kabupaten/kota berkapasitas

fiskal sedang dan kemiskinan rendah, Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

Pada klaster 3 yang merupakan kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah atau sangat rendah, kehadiran Dana Desa seharusnya menambah kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah perdesaan yang tidak bisa dijangkau seluruhnya oleh program dari APBD kabupaten/kota. Dalam praktiknya, justru Dana Desa belum memiliki pengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan di wilayah-wilayah ini.

#### **b). Pengaruh Dana Desa terhadap Cakupan Air Minum Layak**

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji hipotesis seluruh kabupaten/kota penerima Dana Desa 2015-2019, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang positif terhadap perubahan cakupan air minum layak, namun tidak signifikan. Hal ini berarti secara nasional Dana Desa memberikan mempengaruhi peningkatan cakupan air minum layak meski secara statistik tidak signifikan. Dengan menggunakan periode yang sama, penelitian ini membuktikan secara nasional pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak lebih besar daripada pengaruh DAU dan DAK.

Hasil penelitian ini agak berbeda dengan studi Kurniawan (2021) yang mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia Tahun 2015-2018, termasuk di dalamnya air bersih dan sanitasi. Disimpulkan bahwa Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi di perdesaan dan realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.

Kementerian Desa melaporkan sebanyak 993.674 unit air bersih telah

terbangun dari Dana Desa selama periode 2015-2019 (Sirait & Octavia, 2021). Angka ini merupakan capaian yang relatif tinggi dibanding jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 75.436 ribu. Secara rata-rata di setiap desa telah terbangun 13 unit fasilitas air bersih, namun penyebaran yang kurang merata dapat menjadi permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak signifikan di klaster 5 dan klaster 6 namun pengaruhnya tidak signifikan secara nasional.

RPJMN Tahun 2014-2019 telah mengamatkan cakupan air minum layak sebesar 100% tapi faktanya target tersebut hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Salah satu kendala terbesarnya adalah keterbatasan Dana. Sudarsono & Nurkholis (2020) mencatat kontribusi APBD 2015-2016 untuk pengembangan SPAM hanya sebesar 0,04% dari nilai total APBD. Dengan kondisi seperti ini, target akses air minum layak baru akan tercapai pada Tahun 2028.

Untuk menjawab tantangan ini, Dana Desa dapat menjadi alternatif pembiayaan yang berpotensi mengisi kekurangan anggaran peningkatan air minum layak. Hal ini telah dibuktikan pada kabupaten/kota klaster 5 dan 6 yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan meningkatkan cakupan air minum layak. Keberhasilan ini perlu menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota di klaster lain. Dengan demikian, Dana Desa sebagai alternatif pendanaan untuk infrastruktur air minum memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal. Dan hal ini terbukti pada tingkat klaster.

### **c). Pengaruh Dana Desa terhadap Cakupan Sanitasi Layak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk seluruh kabupaten dan kota penerima Dana Desa 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang positif terhadap perubahan cakupan sanitasi layak namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan Dana Desa pada periode 2015-2019 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan sanitasi layak secara nasional meski secara statistik tidak signifikan. Dengan menggunakan rentang periode yang sama, secara nasional dapat dibuktikan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan sanitasi layak lebih besar daripada pengaruh DAU dan DAK.

Laporan dari Kementerian Desa, sebanyak 339.764 unit MCK telah terbangun dari implementasi Dana Desa selama periode 2015-2019 (Sirait dan Octavia, 2021). Jika dibandingkan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara rata-rata di setiap desa hanya terbangun sekitar 4 unit MCK dari Dana Desa. Hal ini mengkonfirmasi hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa tidak signifikan terhadap peningkatan cakupan sanitasi layak secara nasional maupun untuk tingkat klaster.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Akbar & Sihalo (2019) yang menyimpulkan Dana Desa mungkin belum memberikan dampak optimal bagi pembangunan infrastruktur di perdesaan karena peningkatan alokasinya hanya mampu memberi peningkatan pembangunan infrastruktur fisik di bawah 1%. Hasil penelitian lain oleh Batubara, Harahap, & Marpuah (2020) menyimpulkan bahwa Dana Desa mampu mengubah profil desa menjadi lebih baik, terutama dalam infrastruktur jalan, air dan sanitasi.

#### **d). Pengaruh Dana Desa untuk Air Minum Layak terhadap Penurunan Kemiskinan**

Berdasarkan uji hipotesis untuk seluruh kabupaten dan kota penerima Dana Desa Tahun 2015-2019 maka disimpulkan bahwa Dana Desa untuk air minum layak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun tidak signifikan. Dengan demikian, pengaruh tidak langsung Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan cakupan air minum layak tidak terbukti signifikan.

Kecilnya pengaruh Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan cakupan air minum dapat dikarenakan pengaruh langsung Dana Desa terhadap cakupan air minum layak juga tidak signifikan. Di sisi lain, kemiskinan yang diukur BPS adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sepanjang air minum tidak menyebabkan adanya kenaikan pengeluaran rumah tangga amaka tidak akan diperhitungkan secara langsung dalam pengukuran kemiskinan.

Fakta di atas didukung analisis deskriptif penelitian ini, di mana tingginya peningkatan cakupan air minum layak tidak linear dengan penurunan tingkat kemiskinannya. Peningkatan cakupan air minum layak secara nasional sebesar 19,07% poin selama 2015-2020 namun penurunan kemiskinan pada periode tersebut hanya sebesar 1,03 % poin.

Infrastruktur air minum tidak dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan tanpa faktor-faktor lain. Hal ini selaras dengan pernyataan Tortajada (2104); Tortajada & Biswas (2014) dalam (Putra & Rinato, 2017) yang menjelaskan bahwa infrastuktur air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat tapi tidak akan signifikan menurunkan kemiskinan jika tidak

diiringi pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Potensi penurunan kemiskinan melalui peningkatan air minum layak di Indonesia sebenarnya telah banyak dikaji. Penelitian Putra & Rinato (2017) menyimpulkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas air bersih memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah sebesar 17,17% dibandingkan rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Selain itu, kemungkinan menjadi rumah tangga miskin juga lebih tinggi besar 1,29% pada rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih.

Berdasarkan penelitian ini dan didukung penelitian Putra dan Rianto di atas, disimpulkan bahwa meskipun pengaruh cakupan air minum layak terhadap kemiskinan masih sangat kecil namun ada potensi percepatan penurunan kemiskinan melalui peningkatan cakupan air minum yang lauk. Dalam konteks hal ini, Dana Desa dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal tingkat desa dan dapat menjangkau lokasi-lokasi yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh kegiatan dari APBD atau APBN.

#### **e). Pengaruh Dana Desa untuk Sanitasi Layak terhadap Penurunan Kemiskinan**

Berdasarkan uji hipotesis untuk seluruh kabupaten dan kota penerima Dana Desa Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa untuk sanitasi layak tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Pengaruh tidak langsung Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan sanitasi tidak terbukti secara statistik.

Salah satu penyebab ketiadaan pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan melalui cakupan sanitai

layak karena pengaruh langsung Dana Desa terhadap cakupan sanitasi layak tidak signifikan. Selaras dengan uraian terkait air minum layak, sepanjang fasilitas sanitasi tidak menyebabkan naiknya pengeluaran rumah tangga maka tidak akan diperhitungkan secara langsung dalam pengukuran kemiskinan. Serupa dengan uraian terkait air minum layak, hasil analisis deskriptif menunjukkan peningkatan cakupan sanitasi layak secara nasional sebesar 17,39% poin selama periode 2015-2020 namun penurunan tingkat kemiskinan pada periode yang sama hanya sebesar 1,03 % poin.

Jika pembangunan fasilitas sanitasi dapat memengaruhi tingkat kemiskinan maka dampaknya tidak akan dirasakan secara langsung. Hal ini selaras dengan penelitian Ahmed (2013) yang menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap nilai pengeluaran beberapa sektor seperti infrastruktur dan kesehatan kurang efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Komponen utama dalam pengeluaran ini antara lain program sanitasi, perumahan dan penyediaan air. Program-program ini mungkin berpengaruh terhadap kemiskinan namun tidak instan. Dampaknya akan datang dengan jeda waktu.

Akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ketiadaan sanitasi yang layak dan air bersih memadai merupakan awal dari persoalan kesehatan, seperti: *stunting*, kematian bayi serta ibu, penularan berbagai virus, dan penyakit lainnya (Suryani, 2020). Kondisi kesehatan yang buruk akan dapat memengaruhi produktivitas seseorang. Selain itu, samping pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan juga meningkat. Dengan demikian, sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan, fasilitas sanitasi yang layak akan menjadi prakondisi yang sangat penting.

Dalam konteks ini, Dana Desa dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan program sanitasi di tingkat desa. Raharjo (2020) menjelaskan bahwa Dana Desa dapat dipergunakan antara lain untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Eko et al. (2016) menyebutkan bahwa Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa baik berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala Desa.

## KESIMPULAN

1) Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional meski kontibusinya sangat kecil dan pengaruhnya tidak signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah. Jika dibandingkan DAU dan DAK maka Dana Desa terbukti lebih efektif menurunkan tingkat kemiskinan terutama di perdesaan. Secara faktual, pada periode 20015-2019, peningkatan Dana Desa sebesar Rp1 triliun per kabupaten/kota hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,821% poin.

2) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan air minum tapi tidak signifikan secara nasional. Pengaruh Dana Desa signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang atau rendah dengan kemiskinan rendah.

Secara nasional, dapat dibuktikan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak lebih besar daripada pengaruh DAU dan DAK meskipun secara statistik tidak signifikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa Dana Desa sebagai sumber pendanaan infrastruktur air minum

memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal.

3) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan sanitasi namun tidak signifikan secara nasional maupun seluruh kabupaten/ kota.

Secara nasional, dapat dibuktikan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak lebih besar daripada pengaruh DAU dan DAK meskipun secara statistik tidak signifikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa Dana Desa sebagai sumber pendanaan infrastruktur sanitasi memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal dalam mengejar target cakupan sanitasi layak nasional.

4) Dana Desa untuk air minum berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan baik secara nasional maupun untuk seluruh kabupaten/kota.

Meski pengaruhnya tidak signifikan tapi ada potensi mempercepat penurunan kemiskinan melalui peningkatan cakupan air minum yang layak. Dalam konteks ini, Dana Desa dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal tingkat desa

5) Dana Desa untuk sanitasi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara nasional maupun untuk seluruh kabupaten/kota tapi berpengaruh tidak signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan rendah.

Untuk perbaikan ke depan, dalam formulasi alokasinya, selain meningkatkan bobot aspek kemiskinan, kebijakan Dana Desa perlu mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah (kabupaten/kota), di mana peran daerah sangat krusial untuk memastikan efektivitas implementasi Dana Desa di tingkat lapangan.

Diperlukan pula penyesuaian formula dan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai karakteristik kabupaten/kota dan desa untuk menjawab permasalahan spesifik dan lokal sebagaimana dalil dalam teori Desentralisasi Fiskal. Prinsip *one size fit for all* kurang relevan dengan implementasi kebijakan Dana Desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pengambilan kebijakan atau penelitian berikutnya, yakni:

Adanya perubahan kriteria dan metode perhitungan cakupan air minum layak dan sanitasi layak sejak 2019 membawa konsekuensi pada perubahan rumus dan perhitungan variabel. Hal ini berpotensi menyebabkan data penelitian dengan rentang Tahun 2015-2020 ini kurang konsisten.

Di samping itu terdapat beberapa provinsi yang data terakhir Tahun 2020 belum dimutakhirkan sehingga penelitian ini menggunakan data proksi atau terakhir Tahun 2019. Penelitian ke depan perlu mempertimbangkan penggunaan data dengan kriteria dan metode perhitungan baru yang seragam untuk seluruh wilayah dan tahun sehingga konsistensi data terjaga.

## REFERENSI

- Ahmed, M. (2013). *Fiscal Decentralisation and Political Economy of Poverty Reduction: Theory and Evidence from Pakistan*. Durham University . Retrieved from <http://etheses.dur.ac.uk/7288/>
- Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media*

- Trend*, 14(2), 194–200.  
<https://doi.org/10.21107/MEDIATREND.V14I2.4841>
- Batubara, C., Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). The Impact Of Village Funds On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach. *Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 205–230.  
<https://doi.org/10.24042/FEBI.V5I2.6985>
- Eko, S., Putra, A. S., Akhmadin, M., Suhirman, Prayitno, H., Suryana, N., & Mustakim, Z. (2016). *Tanya Jawab Seputar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT. Retrieved from [https://www.academia.edu/34674069/Tanya\\_Jawab\\_Seputar\\_Dana\\_Desa](https://www.academia.edu/34674069/Tanya_Jawab_Seputar_Dana_Desa)
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121.  
<https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Hermawan, A., & Ahmad, A. A. (2019). The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. *International Conference on Rural Development & Entrepreneurship 2019: Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution*, 5(1), 177–183.
- Joetarto, B., Setiawan, A., & Farida. (2020). The Impact of Village Fund Program on Improving Well-being. *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, 13(2), 345–366.  
<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.24395>
- Kadafi, M., Sudrahman, & Sudrahman, H. (2020). The Implications Of Village Funds Received By Underdeveloped Village Per District/City Against Poverty In Indonesia And Literacy Rate: Emperical Evidence In Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9, 1. Retrieved from [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)
- Kementrian Keuangan. (2019). *Buku Saku dan Buku Pintar Dana Desa. DJPK- Kementerian Keuangan*. Jakarta: DJPK- Kementerian Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5562>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2013). *Public policy: politics, analysis, and alternatives* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Kuntansi*, 23(3), 513–522.  
<https://doi.org/10.29264/jfor.v23i3.9245>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. Singapore: McGraw-Hill Book Company.
- Putra, H. S., & Rianto, N. (2016). Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Pengujian Data Rumahtangga, 65–76.
- Putra, H. S., & Rinato, N. (2017). Pengaruh Akses Air Bersih terhadap Kemiskinan di Indonesia: Pengujian Data Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 9(1), 1–12.

- Retrieved from <https://adoc.pub/pengaruh-akses-air-bersih-terhadap-kemiskinan-di-indonesia-p.html>
- Raharjo, M. M. (2020). *Administrasi pemerintahan desa di Indonesia : teori, regulasi, dan implementasi yang menyertai*. Yogyakarta : Gava Media. Retrieved from <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-XOfEQM8W5w>
- Samputra, P. L., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-Parametrik. *JPED: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MI.NJS>
- Santoso, D. (2020). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia. Retrieved from [https://books.google.co.id/books/about/Penduduk\\_Miskin\\_Transient.html?id=TxJTDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Penduduk_Miskin_Transient.html?id=TxJTDwAAQBAJ&redir_esc=y)
- Saragi, N. B. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja*, 65–80. <https://doi.org/10.21787/JPB.13.2021.65-80>
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. Retrieved from [https://www.academia.edu/en/76701950/Analisis\\_Determinasi\\_Kemiskinan\\_di\\_Indonesia\\_Studi\\_Kasus\\_2016\\_2019\\_](https://www.academia.edu/en/76701950/Analisis_Determinasi_Kemiskinan_di_Indonesia_Studi_Kasus_2016_2019_)
- Sirait, R. A., & Octavia, E. (2021, March). Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020. Retrieved August 17, 2022, from <https://berkas.dpr.go.id/puskaji-anggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>
- Sow, M., & Razafimahefa, I. F. (2015). Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. *International Monetary Fund*, 15(59), 1–30.
- Sudarsono, R. A., & Nurkholis. (2020). Pendanaan dalam Pencapaian Akses Universal Air Minum di Indonesia. *JEPI (Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia)*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/JEPI.V20I1.844>
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, undefined-undefined. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.V08.I08.P02>
- Suryani, A. S. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 199–214. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V11I2.1757>
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.22219/JEP.V>

1011.3714

Zakaria, S., Mony, F., & Wahyudi, I. (2020). The Impact of Village Fund Allocation on Poverty in District/Cities Province Maluku, Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(12), 53-61. <https://doi.org/10.7176/JESD/11-12-08>